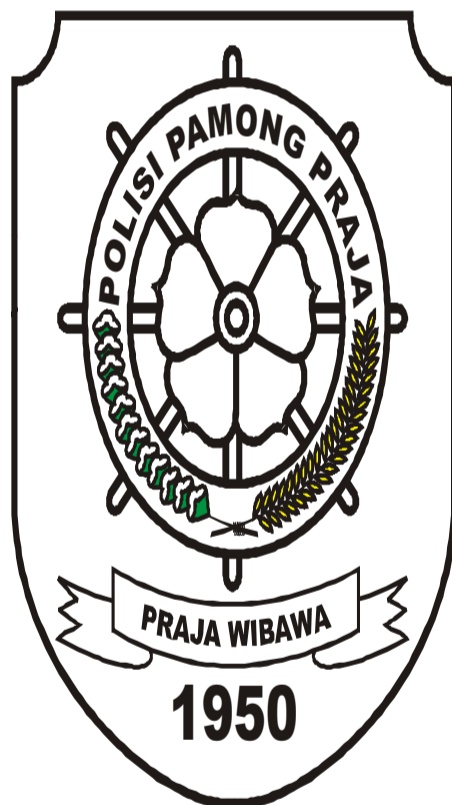




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Hasanuddin No 10 Kel. Sidorejo, Telp (0532) 25052
PANGKALAN BUN (KALTENG)**

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
 - 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN ,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan ssasaran Renja SKPD
 - 3.3 Program dan kegiatan
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Strategi dan Kebijakan
- BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, pada pada dekade terakhir mengalami percepatan proses pembangunan cukup pesat dan saat ini telah menampakkan perubahan Sektor Andalan dari Sektor Kehutanan ke Sektor Pertanian Dalam Arti Luas terutama Sektor Perkebunan. Kegiatan Sektor Perkebunan ditambah kegiatan Sektor Pertambangan dan sektor pendukung lainnya memunculkan fenomena perubahan kondisi aspek-aspek kehidupan masyarakat dibidang Sosial, Ekonomi, Politik Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi tersebut menuntut tugas adan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih memantapkan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien dalam rangka terciptanya *Good Governance*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat (*yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*) keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar salah satu sarat diantaranya adalah mantapnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum, yaitu suatu kondisi dinamis dimana masyarakat dan pemerintah dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Perangkat Daerah mempunyai arti yang sangat strategis membantu tugas Bupati dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, khususnya dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Terwujudnya suasana tentram dan tertib merupakan tujuan yang sangat didambakan masyarakat. Kondisi ini tentunya sangat mendukung dan mendorong upaya-upaya masyarakat untuk lebih bergairah dalam melaksanakan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat sangat perlu memantapkan peran dan fungsinya dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum guna terciptanya good Governance di Kabupaten kotawaringin Barat.

1.2 Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kotawaringin Barat.

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148
2. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Peraturan Daerah Perda No 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 29 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Pelacuran
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet / Sriti

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 disusun dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelayanan masyarakat di bidang Ketertiban Umum, Kententraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah untuk mendukung prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Bupati terpilih yaitu “ *Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya*”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan:

1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
3. Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut:

1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan
2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

1.4 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN ,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan ssasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Tujuan program jangka menengah 2012- 2016 adalah.

- Meningkatkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, Transparan dan Bertanggungjawab serta mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.
- Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- Terwujudnya koordinasi antar instansi terkait,
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat,
- Menambah jumlah Personil Polisi Pamong Praja.

Dan untuk mencapai Tujuan dimaksud diatas ditetapkan Sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai kegiatan Pendidikan dan Latihan baik Internal maupun eksternal sehingga mampu menciptakan aparat yang profesional untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Menurunkan tingkat pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati oleh masyarakat.
- Meningkatkan hubungan antar instansi dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum.

2.2 Analisa kinerja Pelayanan SKPD

➤ Pelayanan Umum

Tercapainya pelayanan prima Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik pimpinan, dinas/badan/instansi/unit kerja maupun masyarakat.

Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Umum telah disusun Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Agar tercapainya dan tepenuhinya proses pelayanan administrasi perkantoran bagi semua pihak yang berhubungan dengan Kantor SATPOL PP Kab. KOBAR
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP Kab. KOBAR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI SATPOL PP
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang (Keseragaman Pemakaian Pakaian Dinas PDH dan PDL) kegiatan SATPOL PP Kab. KOBAR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI SATPOL PP Agar dapat Meningkatkan Kinerja SATPOL PP
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatan kapasitas pelaksanaan TUPOKSI SATPOL PP melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Tersedianya bahan-bahan perencanaan kegiatan, keuangan serta realisasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

➤ Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban

Terciptanya Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta kondusifnya situasi dan kondisi Kab. KOBAR, SATPOL PP sebagai penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan tugas yang kompleks, sehingga membutuhkan aparatur yang tangguh, tanggap, cerdas, disiplin, berdedikasi serta memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur pemerintah.

Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Serta Berlandaskan Hukum telah disusun Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan yang semakin kondusif di wilayah Kab. KOBAR
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terciptanya Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab. KOBAR dari tindak kriminal
3. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Terciptanya Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab. KOBAR dari penyakit masyarakat

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati.

❖ KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum telah disusun Program dengan rincian sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, Transparan dan Bertanggungjawab serta mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.	50 %	55%	57%	58%	60%	68%	70%
2	Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Bupati	50 %	55%	57%	58%	60%	68%	70%
3	Terwujudnya koordinasi antar instansi terkait,	50 %	55%	57%	58%	60%	68%	70%
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat,	50 %	55%	57%	58%	60%	68%	70%
5	Menambah jumlah Personil Polisi Pamong Praja.	106 %	120%	130%	140%	150%	160%	170%

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2015. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tercapainya dan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran bagi semua pihak yang berhubungan dengan kantor SATPOL PP	95 %	
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP Kab.KOBAR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI SATPOL PP	95 %	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP Kab.KOBAR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI SATPOL	95 %	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tercapainya peningkatan kapasitas pelaksanaan TUPOKSI SATPOL PP melalui kegiatan - kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	95 %	
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tersedianya bahan-bahan perencanaan kegiatan, keuangan serta realisasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	95 %	
6	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya kondisi keamanan ,ketentramandan ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab.KOBAR	95 %	
7	Program Pemeliharaan Kanrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya kondisi keamanan ,ketentramandan ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab.KOBAR dari tindak kriminal	95 %	
8	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya kondisi keamanan ,ketentramandan ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab.KOBAR dari penyakit masyarakat	95 %	

BAB III

TUJUAN ,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

1. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak terutama karena imbas krisis ekonomi global menyebabkan banyak masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan di pinggir-pinggir jalan umum, Berkembangnya Praktek Prostitusi, Aksi premanisme dan Meningkatnya jumlah gelandangan dan Pengemis, serta masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah - Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang cukup banyak dari tahun ke tahun.
3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan memelihara Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan yang ingin diharapkan dapat tercapai adalah.

- ❖ Meningkatkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, Transparan dan Bertanggungjawab serta mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.
- ❖ Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- ❖ Terwujudnya koordinasi antar instansi terkait,
- ❖ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat,
- ❖ Menambah jumlah Personil Polisi Pamong Praja.

Untuk mencapai Tujuan dimaksud diatas ditetapkan Sasaran sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Serta kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai kegiatan Pendidikan dan Latihan baik Internal maupun eksternal sehingga mampu menciptakan aparat yang profesional untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- ❖ Menurunkan tingkat pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati oleh masyarakat, Serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- ❖ Meningkatkan hubungan antar instansi dalam penanganan ketentraman dan ketertiban
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban Umum,Serta menempatkan personil Satuan Polisi Pamong Praja di setiap kecamatan untuk membantu penegakan Perda Tersebut.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tercapainya dan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran bagi semua pihak yang berhubungan dengan kantor SATPOL PP
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP Kab.KOBAR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI SATPOL PP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP Kab.KOBAR dalam melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI SATPOL
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tercapainya peningkatan kapasitas pelaksanaan TUPOKSI SATPOL PP melalui kegiatan - kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kantor SATPOL PP Kab.KOBAR	Tersedianya bahan-bahan perencanaan kegiatan,keuangan serta realisasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel
6	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya kondisi keamanan ,ketentramandan ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab.KOBAR
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya kondisi keamanan ,ketentramandan ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab.KOBAR dari tindak kriminal
8	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kabupaten Kotawaringin Barat	Terciptanya kondisi keamanan ,ketentramandan ketertiban yang semakin kondusif di wilayah Kab.KOBAR dari penyakit masyarakat

BAB IV PENUTUP

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya

Pangkalan Bun, 13 Juni 2014

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

H.HASAN BASRI, S.IP
NIP. 19590506 198404 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)
TAHUN 2015

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode	Program / Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.19.1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					564.033.000,00	
	1.19.1.19.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja	jasa perbaikan peralatan kerja	Satuan Polisi Pamong Praja		15.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	Penyedia alat tulis kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		33.151.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		20.209.500,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terlaksananya Jaminan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya dana asuransi kesehatan	Satuan Polisi Pamong Praja		60.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan administrasi keuangan	Penyedia jasa administrasi keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja		60.568.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik	Jasa komunikasi sumberdaya air, listrik, surat kabar dan internet	Satuan Polisi Pamong Praja		35.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyedia jasa cetakan dan penggandaan	Jasa percetakan dan penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja		15.890.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /	Satuan Polisi Pamong Praja		7.110.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

	dinas/operasional	kendaraan dinas / operasional	operasional					
	1.19.1.19.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		9.331.200,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman dokumen / paket	Terlaksananya pengiriman dokumen / paket	Satuan Polisi Pamong Praja		1.500.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat - rapat konsultasi keluar daerah	Kegiatan rapat - rapat konsultasi keluar daerah	Satuan Polisi Pamong Praja		72.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Satuan Polisi Pamong Praja		114.213.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Satuan Polisi Pamong Praja		1.728.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		94.768.345,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Satuan Polisi Pamong Praja		11.563.955,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Penyediaan jasa komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		12.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	1.19.1.19.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					759.500.000,00	
	1.19.1.19.03.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Satuan Polisi Pamong Praja		60.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		40.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebleur	Terlaksananya pengadaan mebleur	Satuan Polisi Pamong Praja		35.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

	1.19.1.19.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Satuan Polisi Pamong Praja		54.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Satuan Polisi Pamong Praja		290.500.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		25.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor tahap II	Tersedianya bangunan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja		255.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.	1.19.1.19.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur					246.794.000,00	
	1.19.1.19.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja		246.794.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.	1.19.1.19.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					110.144.000,00	
	1.19.1.19.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan BIMTEK	Keikutsertaan anggota Satpol PP dalam kegiatan BIMTEK	Satuan Polisi Pamong Praja		110.144.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.	1.19.1.19.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					3.000.000,00	
	1.19.1.19.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Satuan Polisi Pamong Praja		1.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		1.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	1.19.1.19.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan kegiatan akhir tahun	Pelaporan keuangan akhir tahun	Satuan Polisi Pamong Praja		1.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6.	1.19.1.19.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					714.880.000,00	

	1.19.1.19.03.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.19.1.19.03.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja		704.880.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
7.	1.19.1.19.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					107.600.000,00		
	1.19.1.19.03.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Terlaksananya kerjasama kemampuan pengembangan aparat SATPOL PP dengan TNI/POLRI dn kejaksaan	Tercapainya kerjasama kemampuan pengembangan aparat SATPOL PP dengan TNI/POLRI dn kejaksaan	Satuan Polisi Pamong Praja		20.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.19.1.19.03.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terciptanya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Satuan Polisi Pamong Praja		82.600.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.19.1.19.03.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja		5.000.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
8.	1.19.1.19.03.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					160.480.000,00		
	1.19.1.19.03.20.04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Satuan Polisi Pamong Praja		6.500.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.19.1.19.03.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Satuan Polisi Pamong Praja		6.700.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.19.1.19.03.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras narkoba	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras narkoba	Satuan Polisi Pamong Praja		147.280.000,00	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
JUMLAH								2.666.431.000,00	

